

PERAN KEPALA DESA PUNGIT KECEMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN
DALAM MEWUJUDKAN DESA MAJU DI ERA OTONOMI DAERAH



Disusun Oleh : Joni

Npm : 20215012

Dosen pembimbing : Syaini, S.sos., M.I.P

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLTIK

KATA ENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "PERAN KEPALA DESA PUNGIT KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN DALAM MEWUJUDKAN DESA MAJU DI ERA OTONOMI DAERAH".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana sosial, Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial, dan Ilmu politik di Universitas Kaltara

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak/Ibu [Sebutkan Nama Dosen Pembimbing Utama], selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak/Ibu [Sebutkan Nama Dosen Pembimbing Kedua, jika ada], selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi.
3. Yang terhormat Bapak/Ibu [Sebutkan Nama Ketua Jurusan/Program Studi], selaku Ketua Jurusan/Program Studi¹ [Sebutkan Nama Jurusan/Program Studi Anda] yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pungit beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi [Sebutkan Nama Fakultas dan Universitas Anda] yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak [Sebutkan Nama Ayah] dan Ibu [Sebutkan Nama Ibu], serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan moril, dan materiel yang tak ternilai harganya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang [Sebutkan Bidang Studi Anda] dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

tanjung selor,,18,maret,2025

Hormat saya,

Joni

Npm : 202151012

PERSETUJUAN

PROPOSAL SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA PUNGIT KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN
DALAM MEWUJUDKAN DESA MAJU DI ERA OTONOMI DAERAH
(STUDI PADA DESA PUNGIT KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN)

Disusun Oleh:

Joni
NPM. 202151012

Disetujui Untuk Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kaltara

Tanjung Selor,

Pembimbing

SYAINI.S.Sos.M.IP
NIDN. 1103103108201

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Prinsip Otonomi Daerah

2. Pembagian Kewenangan

3. Pemberdayaan Masyarakat

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

6. Pengawasan dan Evaluasi

7. Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Desentralisasi Fiskal

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.2 Manfaat Praktis

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kepemimpinan

1.5.2 Teori Otonomi Daerah

1.5.3 Teori Pembangunan Desa

1.6 Metode Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Definisi dan Konsep Otonomi Daerah

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

2.1.3 Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemerintah desa

2. Struktur Pemerintahan Desa

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

2.3 Peran Kepala Desa

2.2.1 Definisi dan Kedudukan Kepala Desa

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa

2.2.3 Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa

2.4 Pembangunan Desa

2.3.1 Konsep Pembangunan Desa

2.3.2 Indikator Pembangunan Desa

2.5 Desa maju

A. Ciri-ciri Desa Maju

B. Indikator Desa Maju

C. Strategi Pembangunan Desa Maju

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

3.2. Lokasi Penelitian

3.3. Subjek Penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.5. Teknik Analisis Data

3.6. Uji Keabsahan Data

3.7. Tahap-Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai ujung tombak dari implementasi kebijakan pemerintah, desa memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang bersifat langsung dan konkret bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, desa memerlukan kepemimpinan yang efektif dan visioner dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada era otonomi daerah, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola urusan desanya secara mandiri. Melalui otonomi daerah, kepala desa diberikan tanggung jawab besar untuk memimpin dan mengelola sumber daya desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemimpin di tingkat desa harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, adalah salah satu wilayah yang tengah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Desa Pungit, salah satu desa di Kecamatan Sekatak, juga mengalami dinamika dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kepala Desa Pungit memiliki peran penting dalam memajukan desa ini melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Namun, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, tantangan dalam mewujudkan desa yang maju masih cukup besar, mulai dari keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas pendukung, hingga masalah sosial yang mempengaruhi kemajuan desa.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Kepala Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju di era otonomi daerah, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan tersebut.

Otonomi daerah yang mulai bergulir sejak tahun 1999, memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk desa, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peran kepala desa menjadi sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan desa. Kepala desa, sebagai pemimpin formal di tingkat desa, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut:

1. Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah mengacu pada prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

2. Pembagian Kewenangan

Dalam Undang-Undang ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur secara jelas. Terdapat tiga jenis kewenangan yang dibagi, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat: Kewenangan yang bersifat nasional, seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan fiskal.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi: Kewenangan yang lebih spesifik untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau yang memerlukan koordinasi antar daerah.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: Kewenangan yang mencakup urusan pemerintahan yang bersifat lokal dan lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan

untuk memberdayakan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan yang dilakukan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah yang terdiri dari gubernur untuk provinsi dan bupati/wali kota untuk kabupaten/kota, bersama dengan perangkat daerah yang sesuai. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, perencanaan, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

5. Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Undang-Undang ini juga mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menanggulangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana lainnya yang sah. Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

8. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal mengacu pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur anggaran serta sumber daya keuangan daerahnya. Dalam hal ini, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi lokal untuk mendukung pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini

menjadi landasan bagi setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah, termasuk desa. Desa sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah juga memperoleh otonomi untuk mengelola urusannya sendiri, sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Desa Pungit, yang terletak di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, merupakan salah satu desa yang turut merasakan dampak dari otonomi daerah. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bulungan, Desa Pungit memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk mencapai kemajuan. Namun, tantangan dan permasalahan juga tidak terhindarkan, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam era otonomi daerah, kepala desa memiliki peran sentral dalam mengelola potensi desa, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Kepemimpinan yang efektif, visioner, dan partisipatif dari kepala desa sangat dibutuhkan untuk menggerakkan pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran kepala desa di Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju di era otonomi daerah. Fokus penelitian akan tertuju pada bagaimana kepala desa menjalankan fungsi kepemimpinannya, strategi-strategi yang diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kemajuan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju di era otonomi daerah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kepala Desa Pungit dalam melaksanakan peranannya dalam pembangunan desa?
3. Bagaimana dampak kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Desa Pungit terhadap kemajuan desa di era otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran kepala desa di Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju di era otonomi daerah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran kepala desa dalam mewujudkan desa maju di Desa Pungit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk studi lebih lanjut mengenai peran kepala desa dalam memajukan desa di era otonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Kepala Desa Pungit, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memperbaiki kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan, serta dalam merancang kebijakan yang lebih efektif kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam pemerintahan desa dan bagaimana cara menghadapinya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah teori kepemimpinan, teori otonomi daerah, serta teori pembangunan desa. Beberapa referensi utama yang akan dijadikan landasan teori dalam penelitian ini antara lain:

1.5.1 Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan mengacu pada proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan di desa sangat penting, karena kepala desa berfungsi sebagai pemimpin yang mempengaruhi keputusan-keputusan pembangunan, serta menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat

1.5.2 Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk desa. Dengan adanya otonomi daerah, kepala desa memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan potensi dan kebutuhan

masyarakat setempat.

1.5.3 Teori Pembangunan Desa

Teori pembangunan desa mengacu pada proses perubahan yang dilakukan di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang ada. Pembangunan desa yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat desa dalam setiap tahapannya agar tercipta pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Kepala Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Pungit, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Selain itu, dokumentasi terkait kebijakan dan program pembangunan desa juga akan dianalisis untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran kepala desa dalam pembangunan desa.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Mengulas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk teori kepemimpinan, otonomi daerah, dan pembangunan desa.
3. Bab III Metode Penelitian: Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: Menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai peran Kepala Desa Pungit dalam mewujudkan desa maju.
5. Bab V Penutup: Berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan desa di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Definisi dan Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya, sehingga daerah dapat lebih mandiri dan berdaya saing.

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah.

Prinsip-prinsip otonomi daerah antara lain:

1. Desentralisasi: Penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
3. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah: Asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

2.1.3 Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti urusan pemerintahan umum, urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat, urusan perizinan, dan urusan lingkungan hidup. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, seperti urusan pertanian, urusan perikanan, dan urusan pariwisata.

1. Pemerintah desa

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Perangkat desa diangkat oleh kepala desa untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Struktur organisasi pemerintah desa dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing desa. Namun, umumnya terdiri dari sekretariat desa, seksi-seksi (bidang-bidang), dan kepala dusun.

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki berbagai tugas dan fungsi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait. Secara umum, tugas dan fungsi pemerintah desa meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan ekonomi desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa: Meliputi pembinaan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa, serta kerukunan antar warga masyarakat desa.

4. Pelayanan Masyarakat Desa: Meliputi pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat desa, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

2.3 Peran Kepala Desa

2.2.1 Definisi dan Kedudukan Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa dari calon yang memenuhi persyaratan.

2.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memimpin dan mengelola pemerintahan desa. Tugas kepala desa antara lain:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Membina kemasyarakatan desa
4. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

2.2.3 Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa memiliki fungsi kepemimpinan yang penting dalam mewujudkan kemajuan desa. Fungsi kepemimpinan kepala desa antara lain:

1. Sebagai motivator dan inspirator bagi masyarakat desa
2. Sebagai penggerak pembangunan desa
3. Sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian masalah di desa
4. Sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat desa

2.4 Pembangunan Desa

2.3.1 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pembangunan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat kelembagaan desa.

2.3.2 Indikator Pembangunan Desa

Indikator pembangunan desa antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa
2. Tingkat kemiskinan desa
3. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik di desa
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

2.5 Desa maju

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

B. Ciri-ciri Desa Maju:

- 1) Infrastruktur yang Memadai: Jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya dalam kondisi baik dan berfungsi.
- 2) Aksesibilitas yang Baik: Desa terhubung dengan wilayah lain melalui transportasi yang lancar dan mudah.
- 3) Pelayanan Publik yang Berkualitas: Masyarakat memiliki akses mudah ke layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan layanan publik lainnya.
- 4) Ekonomi yang Beragam dan Berkelanjutan: Masyarakat memiliki berbagai mata pencaharian yang tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Terdapat kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, atau pariwisata.
- 5) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- 6) Lingkungan yang Lestari: Desa memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan terjaga kelestariannya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.
- 7) Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- 8) Pemerintahan Desa yang Efektif: Pemerintah desa memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola administrasi, keuangan, dan sumber daya desa.
- 9) Kearifan Lokal yang Terjaga: Adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya, dan kearifan lokal masyarakat desa tetap dilestarikan.

B. Indikator Desa Maju:

Pemerintah Indonesia menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mengukur status kemajuan desa. IDM terdiri dari lima dimensi:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS): Mengukur tingkat kesehatan, pendidikan, modal sosial, kohesi sosial, dan ketersediaan layanan.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): Mengukur tingkat ekonomi masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, dan infrastruktur ekonomi.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): Mengukur kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana.

Desa dikatakan maju jika memiliki skor IDM di atas ambang batas tertentu.

Tujuan Pembangunan Desa Maju:

Pembangunan desa maju bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia di desa.
- 3) Mengurangi kemiskinan di desa.
- 4) Mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

C. Strategi Pembangunan Desa Maju:

Untuk mencapai status desa maju, diperlukan berbagai strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) Pengembangan ekonomi desa melalui diversifikasi usaha dan peningkatan produktivitas.
- 3) Peningkatan infrastruktur desa yang memadai.
- 4) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- 6) Penguatan kelembagaan desa.

Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, desa-desa di Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kepala desa dalam mewujudkan desa maju, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara intensif dan mendalam fenomena peran kepala desa dalam konteks Desa Pungit.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pungit, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Pungit merupakan salah satu desa yang berpotensi untuk maju di Kabupaten Bulungan, dan memiliki kepala desa yang dinilai memiliki peran aktif dalam pembangunan desa.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala Desa Pungit, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan beberapa warga desa yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan peran kepala desa dalam mewujudkan desa maju.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- A. Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa untuk memperoleh informasi tentang peran kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan desa maju.
- B. Observasi: Observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa, serta interaksi antara kepala desa dengan masyarakat.
- C. Dokumentasi: Dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti RPJMDes, RKPDes, laporan keuangan desa, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pembangunan desa.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan penelitian, mengkategorikan data berdasarkan tema-tema tersebut, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

3.6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data akan dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan reliabel.

3.7. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Persiapan : Tahap persiapan meliputi penyusunan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, dan persiapan instrumen penelitian.
2. Pengumpulan Data : Tahap pengumpulan data meliputi pelaksanaan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Analisis Data : Tahap analisis data meliputi transkripsi data wawancara, analisis konten, dan penarikan kesimpulan.

4. Penyusunan Laporan : Tahap penyusunan laporan meliputi penulisan laporan penelitian dan revisi laporan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing.